



SISTEM EKONOMI GERAKAN BENTENG PADA MASA ORDE LAMA

Abdul Rahman
Universitas Negeri Makassar
Email: abdul.rahman8304@unm.ac.id

Abstract

The Indonesian economic situation before 1950 to June 1950, the inflation rate soared rapidly, the value of money fell sharply, as well as the condition of Indonesia's balance of payments. This situation is exacerbated by the increasing number of unemployed, both in urban and rural areas. On this basis, this paper aims to explain the condition of Indonesia's economy in the early days of independence, the emergence of the idea of a fortress movement economic system, and the implementation of the economic system of the fort movement. The method used in this paper is the historical method which consists of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results showed that the condition of the Indonesian economy in the early days of independence experienced instability because the government was busy overcoming various regional upheavals that threatened the integrity of the country. In the midst of this instability, Soemitro Djojohadikusumo appeared to promote the economic system of the fortress movement by strengthening the position of indigenous entrepreneurs so that they were able to compete with foreign entrepreneurs, especially from Chinese businessmen.

Keywords: Beamtenstaat, Economic nationalization, Political economic

Abstrak

Situasi perekonomian Indonesia sebelum tahun 1950 sampai dengan bulan Juni 1950, tingkat inflasi melambung dengan cepat, nilai uang merosot tajam, demikian pula dengan kondisi neraca pembayaran Indonesia. Keadaan ini diperparah dengan bertambah tingginya angka pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Atas dasar hal itu, maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan, kemunculan ide sistem ekonomi gerakan benteng, dan implementasi sistem ekonomi gerakan benteng. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan mengalami ketidakstabilan karena pemerintah disibukkan mengatasi berbagai pergolakan daerah yang mengancam keutuhan negara. Di tengah ketidakstabilan itu, Soemitro Djojohadikusumo tampil mengusung sistem ekonomi gerakan benteng dengan cara memperkuat posisi pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha asing, terutama dari pengusaha Cina.

Kata Kunci: Ekonomi politik, Gerakan benteng, Nasionalisasi ekonomi

1. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara”. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju (Okwita, 2016). Berbagai macam kegiatan pembangunan telah dilakukan di negara ini, dan salah satu fokus perhatian penulis adalah mengenai kebijakan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi pada masa Orde Lama. Pada dasarnya dari segi teoritis kegiatan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi pada masa Orde Lama bertujuan untuk terus mendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan nasional juga harus dimulai dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di berbagai aspek kehidupan bangsa.

Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang (Budiman, 1998). Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya. Pada era Orde Lama, masa pemerintahan presiden Soekarno antara tahun 1959-1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR Sementara (MPRS) yang menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional yaitu:

1. TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara
2. TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969,
3. Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan (Kartono & Nurcholis, 2016).

Dengan dasar perencanaan tersebut membuka peluang dalam melakukan pembangunan Indonesia yang diawali dengan babak baru dalam menciptakan iklim Indonesia yang lebih kondusif, damai, dan sejahtera. Proses merehabilitasi dan merekonstruksi yang diamanatkan oleh MPRS ini diutamakan dalam melakukan perubahan perekonomian untuk mendorong pembangunan nasional yang telah didera oleh kemiskinan dan kerugian pasca penjajahan Belanda.

Pada tahun 1947 Perencanaan pembangunan di Indonesia diawali dengan lahirnya “Panitia Pemikir Siasat Ekonomi”. Perencanaan pembangunan 1947 ini masih mengutamakan bidang ekonomi mengingat urgensi yang ada pada waktu itu (meskipun di dalamnya tidak mengabaikan sama sekali masalah-masalah nonekonomi khususnya masalah sosial-ekonomi, masalah perburuhan, aset Hindia Belanda, prasarana dan lain lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial). Tanpa perencanaan semacam itu maka cita-cita utama untuk “merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional” tidak akan dengan sendirinya dapat terwujud. Apalagi jika tidak diperkuat oleh Undang-Undang yang baku pada masa itu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik ditempuh dengan cara menelusuri sumber-sumber sekunder di perpustakaan dan di situs-situs online berupa buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan ekonomi politik pada

masa Orde Lama. Sumber-sumber tersebut dikritik dalam arti dilakukan kegiatan verifikasi dan pemilihan sumber yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian diinterpretasi dalam arti dianalisis dan diberi penafsiran seobjektif mungkin kemudian dikomparasikan dengan sumber lain. Setelah itu, tafsiran dan interpretasi data dituangkan dalam bentuk tulisan yang lebih dikenal dengan istilah historiografi atau penulisan sejarah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kondisi Ekonomi Pada Masa Awal Kemerdekaan

Pada tahun 1945, Indonesia telah mencapai kemerdekaan setelah lama berjuang. Indonesia mulai membenahi diri di berbagai bidang guna menjadi bangsa yang mandiri dan sejahtera. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Untuk membenahi ekonomi tersebut, telah diberlakukan berbagai kebijakan, hal ini mulai dilakukan sejak tahun 1945. Sebagai contoh, pemerintah menasionalisasikan *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia, gerakan Plan Kasimo, Gerakan Gunting Syafruddin dan masih banyak lagi. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk membenahi kondisi ekonomi. Banyak ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan era RIS tahun 1950, misalnya dalam politik ekonomi terdiri dari: 1) menggerakkan kembali segala alat produksi untuk menambah penghasilan Negara, 2) membangun ekonomi nasional, dengan jalan memberi tuntunan dan bantuan yang layak pada kegiatan ekonomi dan golongan-golongan yang masih lemah, 3) bersama dengan golongan-golongan yang bersangkutan memperbaiki organisasi-organisasi perekonomian dalam masyarakat Indonesia dengan cara gotong royong dan koprasia sentrales, 4) pada umumnya berikhtiar memperbaiki penghidupan rakyat dan menambah penghasilannya (Lindblad & Post, 2009).

Situasi perekonomian Indonesia sebelum tahun 1950 sampai dengan bulan Juni 1950, tingkat inflasi melambung

dengan cepat, nilai uang merosot tajam, demikian pula dengan kondisi neraca pembayaran Indonesia. Keadaan ini diperparah dengan bertambah tingginya angka pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dalam melaksanakan perbaikan ekonomi ini, Sumitro menggunakan prinsip : yang dahulu harus didahulukan. Yaitu dengan mengatasi masalah ekonomi yang tak kunjung membaik. Usaha-usaha perbaikan ekonomi berarti harus dilakukan secepat mungkin melalui suatu program jangka pendek dan bukan jangka panjang. Program ekonomi jangka pendek biasanya berlangsung selama dua tahun dan dengan mudah dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Soemitro juga berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru, yang perlu dilakukan adalah merubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Soemitro mencoba mempratekkan pada sektor perdagangan bahwa para pengusaha pribumi yang semula bermodal lemah hendaknya oleh pemerintah diberi bimbingan dan bantuan secara konkret misalkan dengan pemberian kredit (Wijayanti, 2019).

Konsep yang disiapkan untuk memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia mulai dimunculkannya di permukaan (sekitar enam bulan) setelah Sumitro duduk dalam kabinet. Rencana ekonomi jangka pendek ini merupakan program darurat, atau disebut Sumitro sebagai Rencana Urgensi Perekonomian. Pola kebijaksanaan pembangunan dalam Rencana Urgensi Perekonomian dituangkan lebih lanjut dalam program pengembangan industri di Indonesia, atau lazim disebut sebagai Rencana Urgensi Perindustrian 1951-1952 (An-Naf, 2011). Program pengembangan industri ini juga bersifat darurat dan jangka pendek untuk industri kecil/menengah, industri besar maupun bagi pengembangan laboratorium dan lembaga-lembaga riset lainnya. Dengan tegas dikemukakan bahwa dasar pokok Rencana Urgensi Perindustrian bukanlah memberikan proteksi kepada pembangunan industri di Indonesia, melainkan lebih banyak ditujukan

untuk menghapuskan proteksi yang selama ini berada dalam lingkungan perusahaan Belanda.

Dalam menjalankan ekonomi berencana sebaiknya pemerintah menyediakan anggaran modal investasi tiap-tiap tahun untuk pengusaha-pengusaha pribumi dalam bidang-bidang usaha tertentu menurut rencana dalam urutan yang logis-ekonomis. Memberi fasilitas kredit murah kepada pengusaha-pengusaha pribumi sehingga biasa merugikan pengusaha non pribumi. Adalah tidak bijaksana membiarkan pengusaha pribumi bersaing bebas dengan pengusaha non- pribumi oleh karena sifat mereka yang berlainan dalam bidang perekonomian. Dimana pengusaha pribumi mayoritas memiliki tingkat keahlian lebih rendah dengan pengusaha asing dikarenakan latar belakang yang berbeda. Namun ada juga pengusaha pribumi yang keahliannya lebih maju.

Bibit-bibit pengusaha pribumi tersebut yang punya harapan bakal tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha yang dapat menyusul atau mengimbangi pengusaha-pengusaha non-pribumi hanyalah pengusaha-pengusaha pribumi yang menjalankan perusahaan secara bersungguh-sungguh. Pada umumnya mereka tidak dapat berkembang karena kekurangan modal. Kalau pemerintah ingin melihat lebih banyak pihak pribumi menjadi pengusaha menengah dan menuju kepada pengusaha besar, maka mereka inilah yang harus mendapat kredit investasi yang murah misalnya dengan bunga 4 sampai 5 % setahun selama jangka waktu misalnya paling sedikit 10 tahun. Pengusaha – pengusaha pribumi yang dianggap sebagai “lebih” seperti pengusaha yang notabenehnya adalah penguasa yang sudah berkuasa di era kolonial misalkan pengusaha dibidang perkebunan, ini patutlah dipupuk dan dibina olah pemerintah.

b. Munculnya Ide-Ide Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Dalam catatan sejarah nasionalisme ekonomi Indonesia terdapat dua titik ekstrim. Yang pertama adalah kutub yang moderat, di mana pendukungnya berkeyakinan bahwa mengundang modal

dan investasi asing masih diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua para teknokrat, yang pragmatis dan banyak diilhami oleh pemikiran Harrod-Domar mengenai pentingnya akumulasi kapital, merupakan pendukung utama kutub ini. Intervensi negara, menurut kalangan ini, lebih ditujukan untuk "mempribumikan" kredit, yaitu sebatas memberikan subsidi suku bunga bagi pemberian kredit kepada para pengusaha pribumi yang umumnya kredit berskala kecil dan menengah. Perubahan masyarakat secara ekonomis selalu mengikuti hukum evolusionis dan bukan sesuatu yang instan dan revolusioner. Pengertian indonesianisasi lebih banyak dimaknai sebagai proses nasionalisasi atau pengambilalihan secara paksa oleh pemerintah Indonesia atas properti dan kekayaan milik perusahaan-perusahaan asing terutama Belanda.

Pemerintah Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat mengambil kebijakan-kebijakan untuk membangun ekonomi nasional dari kelompok komunitas pribumi. Pembentukan identitas ekonomi ini merupakan suatu tuntutan zaman dari negeri yang berdaulat. Semangat zaman yang hendak dimunculkan adalah kemandirian dan kemajuan anak-anak negeri terlepas dari bayang-bayang dominasi ekonomi pengusaha asing. Indonesianisasi merupakan satu usaha secara sadar untuk menguasai sektor ekonomi nasional ke tangan penduduk pribumi. Pengertian pribumi ini menunjuk pada etnik asli Indonesia seperti Batak, Dayak, Bugis, Jawa, Sunda, Minangkabau, Madura dan keturunan Eropa, Arab, India kuat untuk membedakan kelompok Cina dan pribumi. Golongan Cina lebih dianggap sebagai pesaing daripada bagian dari komunitas pribumi meski mereka telah lahir di Indonesia. Jika ditilik dari sejarah gerakan nasionalisme ekonomi itu berkembang setelah perang dunia kedua, khususnya kebijakan untuk mengontrol hubungan ekonomi eksternal dan kedaulatan ekonomi. Kemudian pengertiannya diperluas menjadi suatu integrasi terencana dari kebijakan berbeda untuk mengejar tujuan perkembangan ekonomi ke arah modernisasi.

Indonesianisasi mengandung pengertian-pengertian yang perlu dikaji dari berbagai sisi, antara lain; (1) Akar sejarah dapat ditemukan dalam contoh-contoh enterprenuership pribumi semenjak periode akhir kolonial, (2) Kebijakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng antara tahun 1950-1953 merupakan indonesianisasi yang dipaksakan oleh pemerintah dan mengakibatkan gagalnya tumbuhnya investasi kapital asing, terutama Belanda, (3) Indonesianisasi bersamaan dengan industrialisasi pada zaman tahun-tahun awal pemerintahan Sukarno mendapatkan momentum kembali meski dalam ruang yang masih terbatas, (4) Indonesianisasi yang penting adalah pengakuan atas identitas etnik yang menyatu dalam perdagangan dan manufaktur dalam usaha-usaha baru yang dibentuk. Kajian historis terhadap proses perubahan sosial-ekonomi pribumi dalam lintasan tiga zaman ini mendapatkan fakta-fakta menarik yang saling terkait antara peristiwa-peristiwa sejarah natural seperti terjadinya *malaise*, perang revolusi dan dekolonisasi. Tampak bahwa secara makro, perubahan ekonomi pribumi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor determinan yang mendorong rakyat mengembangkan kreatifitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup pada masa-masa sulit.

Pemerintah kolonial memberikan perhatian kepada industri-industri kecil diluar perkebunan dan pertambangan setelah mengalami kehancuran di bidang usaha ekonomi vital. Perkembangan industrialisasi di tanah jajahan membawa perubahan dalam masyarakat terutama monetisasi dan diferensiasi pekerjaan diluar pertanian. Akan tetapi, faktor utama yang memicu masyarakat untuk mengembangkan industri tenun terjadi ketika terjadi penderitaan terutama setelah industri perkebunan hancur dan masa Jepang ketika ketelanjangan melanda masyarakat. Perkembangan industri pribumi di bidang tenun memiliki akar sejarah sejak zaman akhir pemerintahan kolonial. Secara politis makro sebenarnya gerakan ekonomi pribumi berkembang sejak organisasi dagang, Sarikat Dagang Islam (SDI) mengembangkan koperasi-koperasi untuk meningkatkan kekuatan ekonomi

pribumi terhadap pesaingnya, golongan Cina. Sikap "pragmatis-konservatif" ini juga nampak dalam sikap mereka menghadapi struktur kapitalisme pinggiran. Kekuatan ekonomi Barat di bidang perkebunan, industri minyak, pengapalan dan perkapalan, dan kekuatan ekonomi Cina di bidang perdagangan eceran dan industri kecil, dibiarkan utuh tanpa suatu tantangan yang serius, kecuali di bidang perbankan dan impor; dan ini hanya tantangan kecil yang tidak berarti.

Distribusi kekuatan ekonomi, pola pemilikan dari aset-aset produktif, alokasi faktor-faktor produksi dan sentralnya impor dan ekspor dalam perekonomian pada dasawarsa pertama pasca-kolonial menunjukkan betapa struktur kapitalisme pinggiran masih bertahan di Indonesia. Tetapi sebenarnya struktur ini dalam keadaan rusak. Dalam tingkat internasional, hal itu disebabkan oleh dislokasi dan kerusakan yang diderita oleh pasaran dunia akibat perang dunia kedua. Pada tingkat domestik, disebabkan oleh kehancuran prasarana, organisasi kapitalis dan kemapanan keuangan akibat gejolak politik dari tahun 1942 sampai 1949. Walau pun demikian ciri dan kecenderungan kapitalisme pinggiran masih tetap nampak. Karena struktur ekonomi masih mencerminkan struktur kolonial, maka watak dan susunan masyarakat yang tidak seimbang dan pluralistik warisan dari zaman kolonial, tetap bertahan. Namun demikian, revolusi politik secara kualitatif telah mengubah susunan masyarakat tersebut, terutama pada strata atas dan munculnya massa yang terpolitikkan. Perubahan kualitatif ini menandai lahirnya suatu pola baru dari konflik-konflik ekonomi, politik dan ideologi. Kekuatan ekonomi asing kini tidak didukung, dan dilindungi oleh partnernya yang vital negara kolonial sehingga berdiri di atas landasan yang rapuh dan rawan secara politik.

Namun demikian, kepentingan ekonomi golongan menengah diwakili oleh pedagang-pedagang dan eksportir pribumi, pandangan mereka yang liberal, dicampur dengan perasaan bahwa mereka tidak bisa menghapuskan kemapanan ekonomi asing, karena memiliki sedikit atau sama sekali

tidak ada yang bisa ditawarkan untuk menggantikannya, dan juga bahwa pengusiran perusahaan-perusahaan asing akan menyebabkan kesulitan yang serius telah membawa mereka memiliki kecenderungan untuk mempertahankan status-quo ekonomi. Dan kenyataannya, mereka tidak pernah mengejar suatu kebijaksanaan yang secara langsung menyerang kapitalisme pinggiran. Malahan, mereka berusaha untuk memasukkan pengusaha pribumi ke dalam suatu struktur yang tetap utuh melalui pribumisasi keputusan dan kredit. Pada ekonomi kerakyatan yang merupakan sistem ekonomi diutamakan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Karenanya dalam sistem ekonomi kerakyatan berlaku demokrasi ekonomi menghendaki otokrasi ekonomi.

Perekonomian Indonesia Pasca Kemerdekaan dalam tahun-tahun berikutnya memang ternyata bahwa pada tahap awal kemerdekaan, banyak energi dan sumber daya nasional yang sebenarnya bisa disalurkan untuk pembangunan ekonomi, justru dimobilisasi untuk menanggulangi masalah Irian Barat (Abdullah, 2006). Hal ini dikarenakan Presiden Soekarno tak henti-hentinya menekankan bahwa perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda dan hal tersebut merupakan kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Meskipun pemimpin-pemimpin nasional lainnya setuju bahwa masalah Irian Barat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia, beberapa di antara mereka berpendapat bahwa sebaiknya konflik dengan Belanda tentang Masalah Irian Barat di bahas secara tidak mencolok melalui saluran diplomatik biasa, karena Indonesia pada waktu itu sedang menghadapi berbagai masalah lainnya, termasuk masalah ekonomi yang perlu segera di tanggulangi. Pembicaraan tentang kelangsungan bisnis Belanda telah menyita banyak waktu dalam Konferensi Meja Bundar, karena pada tahun 1949 pembangunan ekonomi Belanda yang mengalami banyak kerusakan selama Perang Dunia kedua belum selesai. Berhubung dengan hal ini Pemerintah Belanda

menganggap penting bahwa penghasilan dari perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia perlu diamankan, karena penghasilan ini merupakan sumber pembiayaan penting bagi Pemerintah Belanda untuk membangun ekonomi dan kepentingan di negeri Belanda sendiri. Oleh karena itu, Soemitro Djoyohadikusumo, yang ikut sebagai anggota delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, sangat menentang konsesi delegasi Indonesia Indonesia untuk mengambil alih hutang-hutang dari Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, Drs. Moh Hatta, wakil Presiden Indonesia Republik Indonesia yang bertindak sebagai ketua delegasi Indonesia akhirnya menerima tuntutan pihak Belanda karena beliau ingin cepat menyelesaikan perundingan agar tujuan utama penyerahan kedaulatan kepada Indonesia dapat tercapai dalam waktu sesingkatnya. Sedangkan dalam negeri sendiri pemerintah mengalami berbagai masalah sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan namun keadaan tidak berubah (Hidayat, 2018).

Rencana kebijaksanaan penghematan dan rasionalisasi telah mengakibatkan kekalahan politik bagi para pendukungnya, termasuk perwira-perwira tinggi angkatan darat, kabinet dan pendukung lainnya (Bulkin, 1984). Usaha melawan inflasi yang dilakukan oleh golongan menengah menemui halangan politik. Kekuatan-kekuatan politik yang merasa kepentingan ekonominya terancam, menentang secara terbuka. Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, untuk keselamatan politiknya dan untuk melayani kepentingan ekonomi para pendukungnya, golongan menengah terpaksa mengejar suatu kebijaksanaan yang mendukung perluasan modal, yaitu: stabilitas ekonomi, penghematan keuangan dan peningkatan produksi. Sayangnya, di bawah suatu keadaan di mana keamanan ekonomi asing masih mendominasi perekonomian (Compton, 2020). Kebijakan semacam ini berarti menambah kekuatan ekonomi dan dengan demikian kekuatan politik dari kekuatan ekonomi asing. Lebih buruk lagi, karena tingkat akumulasi yang lebih tinggi dalam perusahaan-perusahaan asing,

pengusaha-pengusaha pribumi yang kepentingannya akan diperjuangkan oleh kelompok golongan menengah selalu akan berada dalam posisi yang inferior dan tidak menguntungkan, yang melawan aspirasi mereka sendiri. Inilah pertentangan-pertentangan yang terkandung dalam diri golongan menengah. Dalam mengejar kepentingan ekonomi mereka sendiri, pada kenyataannya mereka telah mengundang kekalahan politiknya sendiri.

Golongan menengah yang dipelopori oleh Sumitro Djoyohadikusumo nampaknya berusaha mengkompensasi keadaan sulit ini dengan mengusulkan program pribumisasi ekonomi. Konsisten dengan kebijaksanaan ekonomi secara keseluruhan, program ini didasarkan pada sistem pemasukan individu secara bebas. Campur tangan pemerintah direncanakan untuk menciptakan suatu kelompok komersial dan industrial pribumi sejajar dengan kelompok asing, tanpa sedikit pun mengganggu struktur kapitalisme pinggiran. Tetapi situasi kritis dari cadangan devisa dan efek-efek yang sangat merugikan ekonomi telah menciptakan halangan yang tak teratasi. Masalahnya berasal dari konflik tak terselesaikan antara kebutuhan untuk meningkatkan ekspor demi menghindari kekurangan devisa dan akibat yang melawan kestabilan dari ekspansi kredit atau campur tangan dalam ekonomi usaha pribumisasi ekonomi (Mulyadi, 2017).

Program pengembangan industri ini juga bersifat darurat dan jangka pendek untuk industri kecil/ menengah, industri besar maupun bagi pengembangan laboratorium dan lembaga-lembaga riset lainnya. Dengan tegas dikemukakan bahwa dasar pokok Rencana Urgensi Perindustrian bukanlah memberikan proteksi kepada pembangunan industri di Indonesia, melainkan lebih banyak ditujukan untuk menghapuskan proteksi yang selama ini berada dalam lingkungan perusahaan Belanda. Sumitro merumuskan kebijaksanaan itu berdasarkan asumsi-asumsi :

- 1) kalau hubungan kekuasaan yang diwarisi dari zaman kolonial masih bertahan, maka mayoritas penduduk akan tetap miskin;

- 2) industrialisasi harus menggantikan kontrol ekonomi yang dilakukan oleh "kepentingan yang secara organis tidak berakar dalam masyarakat Indonesia".
- 3) pertanian dan industri adalah saling melengkapi sebagai suatu alternatif usaha; industrialisasi diperlukan sebagian untuk mendinamisir daripada mengganti pertanian.

Sumitro mengusulkan skema industrialisasi yang akan bertindak sebagai penentu strategis dari pertumbuhan, khususnya untuk memulai industri-pengganti-impor, yang akan mengurangi sensitivitas perekonomian Indonesia pada pengaruh siklus pasaran internasional, dengan memberikan pinjaman dan bantuan kepada pengusaha pribumi dan mencadangkan pasar-pasar tertentu bagi pengusaha pribumi dalam kebijakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng.

Program pengembangan industri ini bersifat darurat dan jangka pendek baik untuk industri kecil/ menengah, industri besar maupun bagi pengembangan laboratorium dan lembaga-lembaga riset lainnya. Kecuali itu, Soemitro tidak mengabaikan pula usaha-usaha merahabilitasi berbagai jenis industri yang mengalami kerusakan dan kehancuran selama berlangsungnya Perang Kemerdekaan 1945-1950. Menurut R. Sudomo penyelenggaraan ekonomi Indonesia dengan luar negeri tersebar di berbagai kantor dan bagian, baik dari departemen luar negeri maupun dalam negeri dan departemen perekonomian di Indonesia sendiri. Hubungan ekonomi Indonesia dengan luar negeri diserahkan kepada suatu badan pusat, sehingga memungkinkan kebijaksanaan ini dikoordinir dari satu tempat. Adapun Direktorat ini dibagi atas 4 bagian besar, yakni:

- 1) Bagian Politik Perniagaan Luar Negeri, bertugas menjelaskan segala soal yang berkenaan dengan hubungan politik perdagangan Indonesia dengan luar negeri
- 2) Bagian kerjasama Internasional,

bertugas mengerjakan segala soal berkenaan dengan kerjasama internasional dalam lapangan ekonomi (antara lain hasil kerjasama dari GATT, ITO, Comodities Aggrement dan lain-lain organisasi yang bersangkutan dengan ekonomi seperti ECA, FE, ECOSOC dan sebagainya)

- 3) Bagian Penerangan Ekonomi Luar Negeri, bertugas memberikan penerangan mengenai kejadian-kejadian dilapangan ekonomi diluar negeri kepada Indonesia.
- 4) Bagian Bantuan Luar Negeri, bertugas menyelesaikan segala persoalan yang berkenaan dengan bantuan, baik bantuan secara materiil ataupun bantuan yang berupa intelektual dari luar negeri untuk kepentingan. (Munthe et al., 2021)

Selaku Kepala Bagian Penerangan dari Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri, R. Sudomo menyatakan bahwa ekonomi nasional pada dasarnya bersandikan atas kekuatan rakyat jelata yang berkecimpung dibidang perdagangan (pengusaha) namun ironisnya para pengusaha tersebut kekurangan modal, tenaga ahli dan kurang menguasai organisasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para pengusaha-pengusaha pribumi yang kalah dalam persaingan mencari pasar baru, kualitas produk, kualitas manajemen serta keahlian dalam berusaha.

Dalam kebijakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng ini diharapkan para pengusaha-pengusaha pribumi mendapatkan modal yang lebih agar bisa memperluas usahanya dan bisa bersaing dengan para penguasah-pengusaha asing. Adanya peraturan import yang baru oleh pemerintah yaitu tentang pembayaran atau pajak sebesar 40% dari harga barang yang akan di import. Maka banyak pedagang-pedagang import di daerah yang mengeluh tentang peraturan tersebut. Misalkan pedagang import di daerah medan, mereka menganggap bahwa peraturan tersebut mengakibatkan kerugian. Hal ini juga sama keadaan dengan para

pengusah-pengusaha import di daerah Ambon. Ironis memang peraturan yang baru dikeluarkan yang pada dasarnya untuk menekan para pengusaha-pengusaha asing agar tidak memonopoli produk import namun justru juga merugikan bagi para pengusaha import pribumi sendiri. Dari sinilah maka muncul pemikiran dari seorang tokoh ekonomi yang sekian lam berkelana ke luar negeri dan dipanggil kembali ke Indonesia guna menyelesaikan masalah dan persoalan bangsa terutama di bidang perekonomian (Moeljarto, 1995). Namun, masa kebingungan itu segera berlalu, setelah pada awal 1950 kondisi politik nasional berangsur-angsur stabil. Sebuah kabinet dalam suatu alam demokrasi parlementer pertama di Indonesia telah dibentuk pada bulan September 1950. Perdana Menteriya adalah M. Natsir, tokoh Islam terkemuka dari Masyumi. Komposisi dan arah kebijakan dari kabinet Natsir ini sebenarnya mewakili apa yang disebutnya sisi 'administrator' dalam panggung politik Indonesia 1950-an (Siregar, 2011).

Kebijakan ekonomi yang diberi nama Rencana Urgensi Pembangunan (RUP) atau lebih terkenal sebagai Sistem Ekonomi Gerakan Benteng diumumkan oleh Soemitro Djojohadikusumo, Menteri Perekonomian. Dalam kenyataannya, rencana ini merupakan adopsi yang didasarkan pada kebijakan pemerintah kolonial tentang perusahaan pada 1934. Glassburner salah seorang yang menjadi pemerhati ekonomi di Indonesia, menyebut RUP atau sebagai Sistem Ekonomi Gerakan Benteng usaha yang amat nasionalistis untuk mengurangi ketergantungan pada kepentingan ekonomi asing dalam banyak hal, lewat pengembangan industri kecil nasional untuk memproduksi barang substitusi impor dengan harapan mengurangi ketergantungan kepada perdaganga asing; juga lewat bantuan modal bagi perusahaan-perusahaan pribumi, dan lewat restriksi pasar tertentu yang khusus bagi pedagang pribumi (Kirom, 2013). Dengan perkataan lain, kebijakan ekonomi Indonesia pasca kolonial pada 1950-an adalah keberlanjutan dari kebijakan serupa yang diterapkan pemerintah kolonial pada 1930-an. Berbagai kebijakan pemerintah

pada masa itu sebagai usaha untuk merakit kembali banyak segmen dari *beamtenstaat* yang lama.

Pada saat yang sama, kemampuan negara untuk mewujudkan kebijakannya hanya ada pada angka-angka di atas kertas, sebab kenyataannya negara Indonesia pada 1950-an kehilangan banyak fungsi ekonomisnya akibat warisan perang dan revolusi, dan juga adanya reorganisasi birokrasi yang memberi jalan bagi masuknya elemen-elemen baru yang tidak ditemukan sebelumnya pada masa kolonial. Elemen paling penting datang dari kekuatan partai politik. Dalam kenyataannya, partai politiklah, kemudian belakangan juga militer, yang mendapatkan keuntungan ekonomi politik paling nyata dari negara pasca kolonial yang masih muda ini. Usaha sebagian kalangan untuk mendorong berkembangnya suatu 'kelas menengah' yang mandiri di kalangan pengusaha pribumi berakhir pada tingkat retorika politik, gagal diterjemahkan ke dalam seperangkat aturan ekonomi yang terkendali secara rasional (Nasution, 2016).

Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Soemitro Djoyohadikusumo, yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi pada umumnya dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional (Wasino, 2016). Soemitro Djoyohadikusumo mencoba mempraktekkan pemikirannya itu pada sektor perdagangan. Beliau berpendapat bahwa pada bangsa Indonesia harus selekas mungkin ditumbuhkan kelas pengusaha. Dan semenjak itu Dr. Soemitro Djoyohadikusumo diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir. Sebagai langkah pertama yang dilakukan Soemitro Djoyohadikusumo sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian ialah beliau ingin mewujudkan Perekonomian Indonesia yang kuat. Yaitu dengan mengeluarkan peraturan yang berisi sebagai berikut:

- 1) Barang-barang pasar dunia (timah, biji timah, karet, teh, kelapa sawit, kapok, ternak

hidup) yang pengangkutannya melalui pengirim harus disertai pembayaran uang tanggungan 150% dari harga pasarnya.

- 2) Barang-barang yang dapat diangkut hanya dengan surat keterangan dari salah satu wakil dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, terutama dari Jawatan Perdagangan dan Jawatan Koperasi atau Jawatan Organisasi Usaha Rakyat. Barang ini adalah kayu jati, kopra, tembakau dan gula pasir.
- 3) Barang-barang yang dapat diangkut dengan tidak memerlukan uang tanggungan atau surat keterangan yang termasuk salah satu golongan tersebut diatas, dan yang merupakan sebagian besar dari jumlah barang-barang.

Para pengusaha bangsa Indonesia yang pada umumnya bermodal lemah, diberi kesempatan untuk berpartisipasi membangun perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha tersebut, baik dalam bentuk bimbingan konkret atau dengan bantuan kredit, karena pemerintah menyadari bahwa pengusaha-pengusaha Indonesia pada umumnya tidak mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing yang ada di Indonesia (Ekowati, 2006). Apabila usaha ini berhasil, secara bertahap pengusaha bangsa Indonesia akan dapat berkembang maju, maka tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial dibidang perdagangan akan tercapai.

c. Implementasi Kebijakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Gagasan Soemitro Djoyohadikusumo kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir (September 1950-April 1951); ketika itu ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan program ini dikenal Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Yaitu, Dalam kebijakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng ini diharapkan para pengusaha-pengusaha pribumi

mendapatkan modal yang lebih agar bisa memperluas usahanya dan bisa bersaing dengan para penguasah-pengusaha asing. Implementasi nasionalisasi ekonomi dalam Sistem Ekonomi Gerakan Benteng yang dicanangkan dan diumumkan pada bulan April tahun 1950 diperlihatkan oleh intensitas intervensi negara atas lembaga ekonomi dan perundang-undangan yang diterapkan pada tahun 1950-an. Implementasi pokok dari Sistem Ekonomi Gerakan Benteng yang kelihatan adalah mendorong para importir nasional agar dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing termasuk Cina (Abib, Pujiastuti, & Mulyani, 2017).

Karena banyaknya para pengusaha-pengusaha pribumi yang menginginkan ikut serta dalam kebijakan Sistem Ekonomi gerakan Benteng tersebut, pemerintah melakukan penyaringan ketat guna mengeliminasi importer semu atau tidak mampu, misalnya dengan melakukan modal aktif atau pasif. Pemerintah mengadakan seleksi terhadap pengusaha atau pedagang baru dibidang ekspor dan impor, dengan tujuan menyehatkan perdagangan Indonesia. Pada masa itu, sulit bagi pengusaha atau pedagang baru yang belum menjadi anggota Benteng Group untuk mencatat diri sebagai anggotanya. Pemerintah berniat agar pengusaha-pengusaha baru tersebar di seluruh Indonesia. Politik ini bukan saja mengenai importer, bahkan perusahaan dan dunia perdagangan harus tersebar di seluruh Indonesia (Hudayah & Winarni, 2014).

Akibat penyaringan ini jumlah importer yang terdaftar berhasil dikurangi dari 4.300 orang menjadi kurang lebih 2.000. akan tetapi situasi politik dalam negeri setelah pertengahan 1950-an, khususnya setelah pecah pergolakan di daerah, mengalihkan perhatian pemerintah kepada bahaya perpecahan bangsa (Puspitasari, 2005). Penyeludupan komoditas ekspor dari daerah-daerah luar Jawa mengakibatkan pasokan devisa bagi pemerintah Indonesia banyak berkurang, sehingga mengurangi pula dana untuk menunjang kebijakan Sistem Ekonomi gerakan Benteng. Sistem Ekonomi gerakan Benteng yang semula berlangsung sejak tahun 1950 hingga Kabinet Karya Djuanda

(nonpartai). Pada masa kabinet Natsir (Masyumi) Sistem Ekonomi gerakan Benteng pada dasarnya hanya diarahkan pada dua hal, yakni: program-program industri (rencana urgensi) dan penghapusan hak-hak histories. Sistem Ekonomi gerakan Benteng dikendorkan pada masa Kabinet Sukiman (Masyumi dan PNI). Selanjutnya, politik benteng diperketat kembali pada masa kekuasaan kabinet Wilopo (1952-1953).

Karena Sistem Ekonomi gerakan Benteng dianggap sebagai upaya pokok untuk mengembangkan wiraswasta nasional, maka kegagalan program ini menciptakan iklim yang makin condong kearah nasioanalisis perusahaan Belanda, yang di anggap menghambat pengembangan wiraswasta nasional. Sejak pertengahan 1950 kebijakan pribumisasi lewat Sistem Ekonomi gerakan Benteng ternyata berakibat pada inflasi yang serius. Berbagai kredit dan lisensi yang diberikan kepada para pengusaha pribumi lebih banyak dikendalikan oleh kontrol politik daripada kontrol ekonomi. Hal ini tentu saja mengakibatkan defisit anggaran belanja dan pengurusan cadangan devisa. Sementara itu, fasilitas dari pemerintah ternyata tidak mampu memandirikan koperasi. Hal ini terlihat dengan koperasi Mitra Batik didaerah Yogyakarta. Organisasi ekonomi yang pada awal 1950-an diharapkan menjadi wadah para pengusaha untuk menkonsolidasikan kekuatan terutama ketika berkompetisi dengan pengusaha-pengusaha Cina, dalam kenyataannya hanyalah perkumpulan 'klien' dengan kekuasaan politik (Ginting & Andayani, 2012).

Setelah program Benteng diberlakukan secara resmi pada tahun 1950, perekonomian Indonesia kemudian memasuki masa Demokrasi Terpimpin. Beberapa kebijakan ekonomi dibuat selama masa ini. Di antara yang terpenting adalah Deklarasi Ekonomi (DEKON) yang diumumkan pada bulan Maret 1951. Akan tetapi, berbagai kebijakan itu pada kenyataannya tidak lebih dari ambivalensi dan frustrasi pemerintah, terutama Soekarno, yang pada masa itu benar-benar disibukkan dengan agenda propaganda

politik. Khusus tentang posisi pengusaha pribumi, usaha negara untuk mendorong perkembangan mereka berakhir pada jargon-jargon 'sosialisme ala Indonesia' yang sulit sekali diterjemahkan ke dalam dunia ekonomi riil (Rahardjo, 2019). Selama periode ini, perekonomian Indonesia secara terus menerus mengalami kemunduran, untuk tidak mengatakan kejatuhan. Kondisi ini menjadi latar belakang yang memadai bagi timbulnya gejolak sosial dan politik yang semakin memuncak sampai pada pertengahan 1952-an (Sahasad, 2018). Selama Indonesia merdeka ada tiga kebijaksanaan dalam bidang ekonomi yang memberi perhatian dan fokus utama ke pengusaha nasional atau pribumi. Pertama, kebijaksanaan Ekonomi Benteng 1952/1953. Pengusaha nasional, yang dalam hal ini saudagar pribumi, diberikan alokasi devisa untuk impor. Kebijaksanaan ini menumbuhkan pengusaha besar dan menengah secara cepat, dan banyak di antara perusahaan tersebut berkembang sampai sekarang, misalnya perusahaan milik Achmad Bakrie, Soedarpo, dan Haji Kalla (Kunio, 1990).

Kedua, diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 10 dari Menteri Mr Assaat tahun 1952. Hanya pengusaha pribumi yang boleh berusaha di tingkat kecamatan. Aturan ini mendorong tumbuhnya pengusaha kecil di desa yang selama ini dikuasai oleh pedagang-pedagang Cina. Dalam kasus di Sulawesi Selatan, selain keuletan orang-orang Bugis-Makassar dalam berniaga, sampai sekarang pedagang Tionghoa banyak juga di kota kabupaten, cuma tidak sebesar di Jawa atau daerah lain. Ketiga, kebijaksanaan KIK/KMKP (kredit industri kecil/kredit modal kerja permanen). Kebijaksanaan kredit yang secara eksplisit diberikan kepada pengusaha kecil pribumi tersebut membantu tumbuhnya kembali pengusaha kecil/ menengah di daerah (Kunio, 1990). Sementara itu Kementerian Perdagangan dan Perindustrian di waktu dekat ini akan memberikan kredit pada para pengusaha dalam bidang pembangunan yang meliputi industri, kerajinan, perdagangan dan koperasi berjumlah Rp. 7 juta. Hal tersebut akan diberikan setelah para pengusaha setelah permintaannya

diakui bonafitasnya oleh yayasan jaminan kredit di Jakarta.

Sistem Ekonomi gerakan Benteng diarahkan pada pro pribumi yang lebih menyeleksi lagi pada tahun 1953. Pada kabinet Burhanuddin Harahap kebijaksanaan Sistem Ekonomi gerakan Benteng diarahkan pada: 1. semua usaha (termasuk peranakan) disebut usaha nasional. 2. Seleksi semakin ketat bagi prioritas tidak berubah banyak. Program ini berakhir pada masa Kabinet Djuanda. Upaya pemerintah Indonesia Untuk mengembangkan sektor industri manufaktur modern yang dikuasai dan dikendalikan oleh orang Indonesia sendiri dimulai dengan Rencana Urgensi Ekonomi yang bertujuan mendirikan berbagai industri skala besar. Menurut rencana ini, pembangunan industri-industri akan dibiayai dulu oleh pemerintah, akan tetapi kemudian diserahkan kepada pihak-pihak swasta Indonesia, koperasi, atau dikelola sebagai usaha patungan antara pihak swasta nasional dan pemerintahan Indonesia. Gagasan tentang peran perintis pemerintah Indonesia dalam industrialisasi Indonesia agak mirip dengan peran yang dilakukan pemerintah Jepang selama tahap awal industrialisasi Jepang zaman Meiji. Sayang sekali, pelaksanaan Rencana Urgensi Ekonomi berjalan tersendat-sendat dan pabrik-pabrik yang sempat dibangun beroperasi dengan hasil yang mengecewakan (Widiyanta, 2010).

Ditinjau dari segi pengendalian nasional atas perdagangan impor, kebijakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng berhasil karena pada pertengahan tahun 1950-an lebih dari 70 persen dari perdagangan impor sudah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. namun dalam waktu singkat sudah keliatan bahwa kebijakan Sistem Ekonomi gerakan Benteng mengandung berbagai kelemahan, terutama dengan banyaknya "importir aktentas", yaitu orang-orang yang tidak memanfaatkan peluang dengan baik untuk memperoleh ketrampilan dan pengalaman dalam perdagangan impor, tetapi justru menjual lisensi impor yang mereka peroleh kepada importir lain, kebanyakan importir etnis Cina (Wong, 1987). Dengan demikian kebijakan Sistem Ekonomi gerakan Benteng justru membuka

peluang bagi 'kegiatan perburuan rente' (rent-seeking activities) sehingga kurang berhasil dalam mengembangkan golongan wiraswasta nasional sejati yang tangguh dan mandiri. Hal ini sebenarnya sejak awal sudah diprediksi Soemitro Djoyhadikusumo, salah seorang arsitek kebijakan Sistem Ekonomi gerakan Benteng, yang dalam wawancara pernah menyatakan "dari bantuan kebijakan Sistem Ekonomi gerakan Benteng ini diberikan kepada 10 orang, tujuh orang ternyata adalah benalu, tiga orang lainnya masih bisa muncul sebagai wiraswasta sejati".

Kelemahan-kelemahan yang melekat pada kebijakan Sistem Ekonomi gerakan Benteng mendorong pemerintah Indonesia mengadakan penyingkapan ketat untuk mengeliminasi importir semu atau tidak mampu. Akan tetapi perkembangan politik dalam negeri setelah pertengahan tahun 1950-an, khususnya di daerah-daerah, mengalihkan perhatian pemerintah kepada bahaya perpecahan bangsa. Penyalundupan komoditas-komoditas ekspor dari daerah-daerah luar Jawa mengakibatkan pasokan devisa bagi pemerintah banyak berkurang sehingga mengurangi devisa untuk menunjang kebijakan Sistem Ekonomi gerakan Benteng. Memang di atas kertas, pemerintah Indonesia secara gradual dapat mengembangkan satu golongan wiraswasta nasional dan manajer profesional yang cukup tangguh. Pengembangan wiraswasta nasional di usahakan melalui kebijakan Sistem Ekonomi gerakan Benteng ini, tetapi kebijakan ini dengan beberapa pengecualian, telah gagal dalam mengembangkan wiraswasta nasional yang tangguh. Manajer-manajer profesional yang diharapkan dapat muncul dari kalangan manajerial pribumi yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Hal ini termasuk kegagalan untuk mengembangkan wiraswasta nasional yang tangguh, akhirnya mendorong pemerintah Indonesia segera menghapus kebijakan Sistem Ekonomi gerakan Benteng sekitar tahun 1953-an. Karena kebijakan Sistem Ekonomi gerakan Benteng dianggap sebagai upaya pokok untuk pengembangan wiraswasta nasional, maka kegagalan kebijakan ini menciptakan iklim yang condong untuk menasionalisasikan usaha-

usaha Belanda yang dianggap menghambat pengembangan wiraswasta nasional.

4. SIMPULAN

Secara pragmatis dalam periode Demokrasi Parlementer 1950-1957, pemerintahan di pimpin oleh seorang Perdana Menteri M. Natsir yang berasal dari Partai Masyumi. Kebijaksanaan ekonomi pada periode kabinet Natsir beranggapan bahwa, pertama : modal asing diperlukan oleh perekonomian Indonesia, kedua : modal asing dapat di awasi dengan melalui peraturan pemerintah, ketiga : nasionalisasi perusahaan asing tidak ada gunanya apabila modal asing belum bisa di gantikan oleh perusahaan-perusahaan pribumi yang mampu mempertahankan tingkat produktivitas dan efisiensi teknik serta manajemen yang setara. Dr. Soemitro Djohadikusumo, sebagai Menteri Perdagangan dan Industri pada periode demokrasi parlementer juga berpendapat, bahwa "negara harus memainkan peran yang menentukan, terutama pada tahap awal pembangunannya dan bahwa pengusaha-pengusaha asing mutlak harus di awasi karena belum terdapat kelompok-kelompok pengusaha yang kreatif dari kalangan bangsa Indonesia sendiri"

Dari Kebijakan ekonomi yang telah di keluarkan oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan, terlihat sangat jelas sekali nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam kebijakan "ekonomi nasional" Indonesia. Dalam hal ini banyak pengamat ekonomi di Indonesia menyebutkan bahwa periode tersebut adalah periode "nasionalisme ekonomi" yang berarti mencakup tiga dimensi pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, suatu perekonomian yang beragam dan stabil, yang berarti di tiadaknya ketergantungan yang besar kepada ekspor bahan mentah. Kedua, suatu perekonomian yang sudah berkembang dan makmur atau pembangunan ekonomi. Ketiga, suatu perekonomian dimana satu bagian yang penting dari pemilikan, pengawasan dan pengelolaan di bidang ekonomi berada di tangan golongan pribumi atau negara Indonesia, yang berarti pengalihan penguasaan dan pengelolaan atas kegiatan-

kegiatan ekonomi dari tangan orang-orang barat dan Cina ke tangan orang-orang Indonesia. Untuk melaksanakan kebijakan nasionalisme ekonomi, pemerintahan pasca kemerdekaan melaksanakan proteksi, satu di antara beberapa keputusan yang di ambil oleh pemerintah Indonesia adalah menentukan dan memilih importir-importir yang layak di beri bantuan pemerintah. Para pengusaha yang dapat melalui penyaringan itu dan berhak atas bantuan pemerintah, biasanya dinamakan importir-importir “Benteng”. Secara garis besar, kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintahan pasca kemerdekaan sebenarnya banyak memberikan perubahan-perubahan mendasar dalam kegiatan pembangunan ekonomi, hal ini terbukti dengan munculnya kegiatan sektor informal yang menjadi soku guru perekonomian Indonesia saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2006). *Menanti Kemakmuran Negeri: Kumpulan Esai Tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Abib, A. S., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Konsep Penanaman Modal Sebagai Upaya Mestimulasi Peningkatan Perekonomian Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 7(1), 19–39.
- An-Naf, J. (2011). Tinjauan Analitis Terhadap Model Pembangunan Indonesia. *KYBERNAN Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 68–82.
- Budiman, A. (1998). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bulkin, F. (1984). Kapitalisme Golongan Menengah dan Negara. *Prisma*, (2).
- Compton, B. R. (2020). *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-Surat Rahasia Boyd R. Compton*. Jakarta: LP3ES.
- Ekowati, Y. (2006). *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Surabaya 1950-1965*. Surabaya: UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Ginting, D. H., & Andayani, T. (2012). Peranan Masyarakat Tionghoa dalam Perdagangan Perekonomian di Kota Binjai pada Tahun 1968-2008. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2).
- Hidayat, S. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia: Amalgam Militer-Sipil. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(2), 25–52.
- Hudayah, N., & Winarni, R. (2014). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember dari Zaman Orde Lama Sampai Zaman Reformasi Pada Tahun 1998-2012. *Publika Budaya*, 2(2), 19–31.
- Kartono, D. T., & Nurcholish, H. (2016). *Konsep dan Teori Pembangunan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kirom, S. (2013). Buruh Dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja Di Indonesia (Masa Kolonial-Orde Lama). *Avatara*, 1(1), 9–15.
- Kunio, Y. (1990). *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Lindblad, J. T., & Post, P. (2009). *Indonesian Economic Decolonization in Regional and International Perspective*. Netherland: KITLV Press.
- Moeljarto. (1995). *Politik Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mulyadi, S. M. (2017). *Kerjasama Ekonomi dan Militer Uni Soviet-Indonesia, 1955-1965*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Munthe, R. N., Mardia, M., Nugraha, N. A., Basmar, E., Syafii, A., Pardede, A. F., ... Rahman, A. (2021). *Sistem Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Nasution, R. D. (2016). Indonesia sebagai Emerging Power: Perspektif Ekonomi Militer. *ARISTO*, 3(2), 54–67.
- Okwita, A. (2016). Wacana Dan Ketidakmeratan Pembangunan Di Indonesia Inequality Of Discourse And Development In Indonesia. *CAHAYA PENDIDIKAN*, 2(2).
- Puspitasari, S. H. (2005). Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi Beberapa Catalan Atas Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama, Orde

- Baru Dan Pasca Orde Baru. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 12(28), 46–61.
- Rahardjo, M. D. (2019). *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Sahasrad, H. (2018). Kemunduran dan Keruntuhan Ekonomi Muslim Pribumi di Indonesia. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 18–32.
- Siregar, I. F. (2011). Dinamika Demokrasi Di Indonesia Masa Orde Lama: Studi Kasus Antara Sukarno Versus Masyumi. *Paramita: Historical Studies Journal*, 21(1).
- Wasino, W. (2016). Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(1), 62–71.
- Widiyanta, D. (2010). Keberadaan Etnis Cina dan Pengaruhnya dalam Perekonomian di Asia Tenggara. *Dalam Jurnal MOZAIK*, 5(1).
- Wijayanti, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Indonesia Masa Orde Lama Dibidang Ekonomi Terhadap Bisnis Orang Cina. *Jurnal Artefak*, 3(2), 113–118.
- Wong, J. (1987). *Politik Perdagangan Cina di Asia Tenggara*. Jakarta: Bumi Aksara.